



Eggi Sudjana Berdalih Unjuk Rasa Bukan Makar • Lucas Mour Jadi Idola di Spurs • Ratna Sarumpaet Optimistis akan Bebas • Libur dan Cuti Bersama Lebaran Diproyeksi 11 Hari • NasDem Peroleh Limi

## Indonesia dan Tantangan DK PBB

Penulis: [Angel Damayanti Dekam Fisipol WIKI Jakarta](#)  
Pada: Jumat, 03 Mei 2019, 04:10 WIB @PINDI



Ist

### Ilustrasi

SEPANJANG Mei 2019-Agustus 2020 Indonesia bertugas sebagai Presiden di Dewan Keamanan (DK) PBB. Komitmen Indonesia dalam memerangi terorisme, keterlibatannya di pasukan perdamaian PBB, serta keberhasilan menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, melalui ASEAN, memberikan rasa percaya diri bagi Indonesia untuk mengusung isu-isu tersebut ketika menjadi Presiden di DK PBB, sebagaimana disampaikan Menlu Retno LP Marsudi (Media Indonesia, 6/6/2018).

Menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 2019-2020 dan Presiden DK PBB pada Mei 2019-Agustus 2020, di satu sisi memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjembatani kepentingan nasional, kepentingan negara-negara di Asia yang diwakili Indonesia, sekaligus menyorakan aspirasi masyarakat internasional dalam upaya pemeliharaan stabilitas dan keamanan internasional.

### Tantangan

Sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, terutama pasal 25 yang menyebutkan The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter, DK PBB memiliki keistimewaan tersendiri. Berbeda dengan organ lainnya, dalam PBB yang hanya dapat memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota PBB, DK PBB memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang diterima dan dilaksanakan seluruh anggota PBB.

Pentingnya fungsi DK PBB dibarengi juga dengan adanya hak veto yang hanya dimiliki lima negara anggota tetap DK PBB, yang menjadi pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Awalnya, hak veto diberikan sebagai daya tarik agar lima negara tersebut bersedia terlibat dalam PBB. Belajar dari pengalaman Liga Bangsa-bangsa (LBB) yang lebih dulu dibentuk, ketidakhadiran AS di dalamnya membuat LBB tidak bertahan lama.

Hakikatnya, hak veto ini diberikan kepada lima negara pemenang perang tersebut untuk mencegah DK PBB mengambil keputusan yang dianggap mengancam kelima negara besar tersebut dan berujung pada Perang Dunia. Itu berarti, kelima negara pemegang hak veto memiliki kekuatan sekaligus tanggung jawab besar untuk mencegah terjadinya perang dan memastikan PBB dapat menjalankan fungsinya.

Yang terjadi, hak veto justru sering kali digunakan negara-negara tersebut untuk mengamankan kepentingan nasional dan negara-negara sekutunya. Sejak 1946 hingga 2016, AS misalnya, telah mengeluarkan 79 kali veto dan Rusia mengeluarkan 104 kali veto terhadap sejumlah draf resolusi yang dikeluarkan DK PBB karena dianggap mengancam kepentingan mereka.

Dalam 10 tahun terakhir, AS, Rusia, dan Tiongkok menjadi negara yang lebih sering mengeluarkan veto jika dibandingkan dengan Inggris dan Prancis. AS, Tiongkok, dan Rusia misalnya, baru-baru ini saling melakukan veto terkait dengan krisis politik di Suriah dan Venezuela. Sebelumnya, AS juga telah mengeluarkan veto terhadap draf resolusi DK PBB terkait dengan status Jerusalem dan kecaman atas tindakan Israel di jalur Gaza.

### Berita Terkini

#### Siklon Tropis Lili Tumbuh di Laut Timor, Pelayaran Harus Waspada

##### HUMANIORA

Kecepatan angin maksimum di pusat siklon mencapai 35-40 knot dengan arah gerak ke Selatan-Barat...

Kamis, 09 Mei 2019, 16:05 WIB



#### Bupati Malang Divonis 6 Tahun Penjara

##### POLITIK DAN HUKUM

Terdakwa Rendra Kresna terbukti menerima uang suap senilai Rp7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas...

Kamis, 09 Mei 2019, 16:05 WIB



#### BMKG Sebut Wilayah Sumsel Masuk Musim Kemarau

##### NUSANTARA

Arah angin permukaan yang terjadi umumnya dari tenggara. Minimnya pasokan uap air dan kecepatan angin lapisan...

Kamis, 09 Mei 2019, 16:00 WIB



#### Jokowi-Amin Dipastikan Menang Telak di Jatim

##### POLITIK DAN HUKUM

Dari rekapitulasi penghitungan suara di 23 kabupaten/kota, Jokowi-Ma'arif menang cukup mutlak dengan...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:57 WIB



#### Bahaya, Ancaman Kepunahan Spesies Meningkat Drastis!

##### WEEKEND

Laporan badan PBB, IPBES menyebutkan bahwa sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan kini terancam...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:55 WIB



#### BPPI Dorong Presiden Bentuk Zaken Kabinet

##### POLITIK DAN HUKUM

Zaken kabinet merupakan kabinet yang berisikan orang-orang...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:50 WIB



#### TKN : Hentikan Provokasi, Perbanyak Introspeksi Diri

##### POLITIK DAN HUKUM

TKN mempertanyakan sikap segelintir elite politik yang kerap mendeligitasi pemilu...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:45 WIB



#### Pelatih Yakin Greysia/Apriyani Tampil Prima di Piala Sudirman

##### OLAHRAGA

Greysia/Apriyani merupakan pasangan yang konsisten dan stabil sehingga dipilih menjadi satu-satunya ganda...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:45 WIB



#### Ratna Sarumpaet Berbohong karena Kontraksi Dua Obat

##### POLITIK DAN HUKUM

Dua obat yang dimaksud ialah obat antidepresan yang rutin dikonsumsi terdakwa dan obat bius saat tindakan...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:42 WIB



#### Mahasiswa Terpilih Jadi Anggota Legislatif Termuda Dari Bondowoso

##### POLITIK DAN HUKUM

Di Dapil 1 Bondowoso ini, PDI Perjuangan berhasil



Perubahan PBB 1979 memelihara keamanan dan perdamaian internasional bisa terhambat. Terutama karena Indonesia memberikan perhatian khusus pada penyelesaian konflik Israel-Palestina dan masalah terorisme.

#### Amacamam keamamam

Sejumlah pengamat hubungan internasional meyakini bahwa konflik antarnegara berkurang jauh setelah Perang Dunia II berakhir. Hal itu disebabkan antara lain menurut John Andrews dalam bukunya *The World in Conflict* (2015) karena menguatnya proses globalisasi yang mendorong terciptanya kepentingan bersama melalui perdagangan dan investasi, yang mendorong negara-negara untuk menghindari perang.

Namun, seperti dicatat Harari dalam *21 Lesson for the 21st Century* (2018) dan Mahubani dalam *The Great Convergence: Asia, the West and the Logic on One World* (2014) berkurangnya perang antarnegara bukan berarti kondisi internasional bebas dari ancaman. Sebaliknya, hingga saat ini agenda DK PBB masih diwarnai berbagai upaya untuk menciptakan stabilitas akibat konflik politik di dalam negeri sejumlah negara yang berakibat pada krisis kemanusiaan dan migrasi besar-besaran, seperti yang terjadi di Suriah, Somalia, Libia, Sudan, Haiti, dan Venezuela. Lemahnya identitas nasional, menurut Fukuyama (2018), menjadi penyebab utama terjadinya kekacauan di dalam negeri negara-negara tersebut.

Baca juga

by

Jokowi-Amin Menang, Habib Rizieq Siap  
Dijemput Pulang

Tidak Siap Kalah Massa Dikerahkan

Dokter asal Beijing ungkap cara memulihkan  
persendian

Babel Peringkat 5 Nasional untuk Hasil UNBK  
SMA/SMK

Agenda lainnya yang juga dibahas dalam sidang-sidang DK PBB ialah tentang peningkatan peran dan kapasitas pasukan perdamaian PBB di sejumlah daerah konflik, keterlibatan perempuan dalam upaya perdamaian dan penciptaan keamanan, penyelesaian masalah Israel-Palestina, serta penghentian pengembangan senjata nuklir dan pemusnah masal.

Isu lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembahasan sidang-sidang DK PBB ialah masalah terorisme dan radikalisme, ketakutan masyarakat internasional terhadap Islam dan kesalahpahaman antarperadaban (Sukma, 2018). Peristiwa penembakan di Mesjid Al Noor dan Linwood di Selandia Baru oleh pengagum kelompok white supremacist serta peledakan tiga gereja di Sri Lanka oleh kelompok radikal Islam, National Tawheed Jama'ath (NTJ), yang berafiliasi dengan IS, menunjukkan benturan peradaban saat ini makin masif terjadi melalui aksi terorisme.

Dengan demikian, posisi dalam DK PBB saat ini sesungguhnya menjadi peluang emas bagi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, untuk menunjukkan wajah Islam yang membawa damai bagi seluruh umat manusia.

Di samping itu, Indonesia dapat membagikan keberhasilannya menangani masalah terorisme di dalam negeri kepada negara-negara lain. Pendekatan penegakan hukum dan belakangan seperti yang dituangkan dalam UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, pendekatan pencegahan dengan prinsip perlindungan HAM dan kerja sama internasional menjadi kunci untuk menanggulangi masalah tersebut.

Dalam menghadapi tantangan keamanan internasional, sekaligus hambatan mekanisme DK PBB yang dianggap tidak demokratis dengan kepemilikan hak veto oleh segelintir negara, ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia melalui diplomasinya.

Pertama, Indonesia harus bisa membangun sebuah persepsi yang sama tentang ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas internasional serta urgensinya. Negara-negara anggota DK PBB, terutama pemegang hak veto dan seluruh masyarakat internasional, perlu diyakinkan bahwa apa pun bentuk ancaman dalam sistem internasional hari ini, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya, semua itu merupakan ancaman terhadap umat manusia dan eksistensinya. Di situlah peran dan komitmen PBB perlu dibuktikan.

Kedua, upaya membangun rasa saling percaya di antara negara-negara anggota PBB, khususnya DK PBB, harus terus dilakukan. Hampir semua konflik internasional dan tindakan saling veto dalam DK PBB lebih disebabkan kurangnya rasa saling percaya. Di sinilah peran Indonesia perlu ditunjukkan. Jika sebelumnya Indonesia telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Indo Pasifik melalui ASEAN, Indonesia tentu dapat berkiprah lebih banyak ketika menjadi anggota tidak tetap dan menjabat sebagai Presiden DK PBB.



TAGS: #Opini

### Saksi Ahli Sidang Ratna Sebut Berbohong bukan Tindak Pidana

POLITIK DAN HUKUM

Pemohonan maaf sudah cukup untuk menyelesaikan perkara kebohongan...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:37 WIB



### Penukaran Uang Pecahan, BI Lampung Sediakan Rp5 Triliun

NUSANTARA

Jumlah ini lebih tinggi dari Idul Fitri tahun sebelumnya yang hanya Rp3,1...

Kamis, 09 Mei 2019, 15:34 WIB



Read More

### Top Tags

# Pilpres 2019 # Pemilu 2019 # Ramadan 1440 H  
# Pemindahan Ibukota

### Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?

- Setuju  
 Tidak Setuju  
 Tidak Peduli

PILIH



### Berita Populer

#### Andi Arief Sebut Angka 62% Kemenangan Prabowo Kreasi Setan Gundul

POLITIK DAN HUKUM

Partai Demokrat siap meninggalkan Koalisi Adil Makmur jika Prabowo lebih memilih mensubordinasikan koalisi...

Senin, 06 Mei 2019, 08:19 WIB



#### TNI-AD Buru Perwira Penyebar Hoaks

POLITIK DAN HUKUM

Sebelumnya, eks Menko Maritim Rizal Ramli mengaku telah menerima informasi penting dari TNI-AD terkait hasil...

Selasa, 07 Mei 2019, 08:50 WIB



#### Fadli Zon tidak Bisa Mengatasnamakan DPR untuk Setop Situng KPU

POLITIK DAN HUKUM

Baidowi mengatakan bahwa Situng telah dengan jelas diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) yang disepakati semua...

Jumat, 03 Mei 2019, 18:35 WIB



#### Datangi KPU, Politisi Gerindra Minta Situng Disetop

POLITIK DAN HUKUM

"Bagi saya sih sebetulnya salah input itu adalah



HOME NEWS RAMADAN FOTO VIDEO WEEKEND EKONOMI INTERNASIONAL MEGAPOLITAN NUSANTARA OLAHRAGA POLITIK DAN HUKUM SEPAK BOLA

RI Harus Manfaatkan Momentum di DK PBB

Dokter asal Beijing ungkap cara memulihkan AD

TKN Nilai Ijtimak Ulama Alpa Sampaikan Bukti

Luhut Sebut Sejak Awal Prabowo Bersedia untuk

Ijtimak Minta 01 Didiskualifikasi KPU :

Kesaksian Rocky, Ratna telah Buat Onar

Tempat Rukyat dan Hilal Awal Ramadan 1440 H

Ahli ortopedi Beijing: "Nyeri lutut hilang dalam AD

## Hendardi: Jangan Patuhi Keputusan Ijtimak Ulama III

POLITIK DAN HUKUM

Dari lima butir keputusan Ijtimak Ulama III, menurut Hendardi terlihat inkonsistensi keputusan yang satu...

Jumat, 03 Mei 2019, 11:20 WIB

## Viral, Petisi Setop Izin FPI Capai 36 Ribu Tanda Tangan

POLITIK DAN HUKUM

Masa berlaku izin FPI akan berakhir pada 20 Juni...

Selasa, 07 Mei 2019, 16:10 WIB

## Upaya Metro TV Pertemuan Karim dengan Panglima TNI

HUMANIORA

News anchor Metro TV Yohana Margaretha mengaku terkejut untuk memberitakan sosok Karim hingga akhirnya...

Minggu, 05 Mei 2019, 00:37 WIB

[Read More](#)

medcom.id



mbanua.id

LAMPUNG POST

### RUBRIKASI

#### OPINI

Editorial  
Podium  
Kolom Pakar

#### EKONOMI

Politik dan  
Hukum

#### HUMANIORA

Nusantara

#### OLAHRAGA

Sepak Bola  
Otomotif

#### WEEKEND

Megapolitan

#### VIDEO

Foto  
Infografis

Copyright © 2019 Media Group - mediaindonesia - medcom.id, All Rights Reserved

Berita

MI Komunitas

Event Organizer

Publishing

Rss

Tentang

Beriklan

Contact

Karir

Pedoman Media Siber

#### IKUTI KAMI DI

Youtube

Facebook

Twitter

Contact Info

#### INFORMASI

Phone: 021 582 1303

Fax: 021 582 0476

Email: cs@mediaindonesia.com

marketing.onlinedigital@mi.com

